

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU REFERENSI

Bartono, 2010, *Hotel Supervision*, Andi, Yogyakarta.

Daniar dan Peter Van den Bossche, 2010, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Obor Indonesia, Jakarta.

Harrington dan Gill, Soedjoko Kuswadi (Penerjemah), 2008, *Buku Saku Kesehatan Kerja Edisi 3*, EGC Jakarta.

Herman Budi Sasono, 2012, *Manajemen Pelabuhan Dan Realisasi Ekspor Impor*, Andi, Yogyakarta.

Jatim, Rozaimi , 1978, *Undang-Undang Perkapalan*, Yayasan Neptunus, Semarang

Mulyanto, Felix Hadi dan Endar Sugiarto, 2010, *Pabean Imigrasi dan Karantina*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Pudyatmo, Sri 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta.

Siswosoediro, Henry 2008, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan dan & Dokumen*, Visimedia Jakarta.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabeta, Bandung.

Sugiyono, 2013, *Metode Pengumpulan Data dan Penelitian*, CV Alfabeta, Bandung.

Sukmadinata dan Nana Syaodih, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

### B. INTERNET

Dinas Perhubungan Laut, <http://hubla.dephub.go.id/Default.aspx>. Diakses pada 18 Maret 2017.

Antonius, <http://antoniuspp.blogspot.co.id/2016/05/bukupelaut-online-ksop-tg-emas-smg.html?m=1>. Diakses pada 21 Maret 2017.

### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomer 15 tahun 2016 Tentang Jenis PNPB Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan No 30 Tahun 2008.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 176 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomer KM 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 37 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan Sebagai Atase Perhubungan, Staf Teknis Perhubungan dan Tenaga Staf Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014.

